

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA UTARA

TAHUN 2016



**INDESKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
2016**

<https://halutkab.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2016

Anggota Tim Penyusun:

- Pengarah : - Suswanto, SE., MM. -
- Penulis : - Moh. Rizky Firman Abadi, SST. -
- Dedhy Sugiharjo, SST. -
- Editor : - Moh. Rizky Firman Abadi, SST. -
- Pengolah Data : - Moh. Rizky Firman Abadi, SST. -
- Desain Grafis : - Fredik LM Hopaya -

<https://halutkab.bps.go.id>

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN HALMAHERA UTARA 2016

No. Publikasi : 82050.1705

Katalog BPS : 9302020.8205

Ukuran Buku : 14,8 x 21 cm

Jumlah Halaman : vi + 72 Halaman

Naskah :

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit :

Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan Oleh :

© BPS Kabupaten Halmahera Utara

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya.

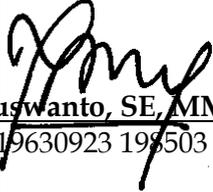
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan publikasi “Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Halmahera Utara 2016” dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Publikasi ini berisikan uraian singkat tentang IPM Kabupaten Halmahera Utara yang memberikan informasi tentang sejauhmana pembangunan telah dilaksanakan jika dilihat dari tiga indikator yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Publikasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu barometer untuk mengukur sejauh mana kebijakan dan program pemerintahan daerah telah berhasil untuk mensejahterahkan masyarakat. Berbicara tentang program yang bersifat sosial yaitu dibidang kesehatan dan pendidikan maka terkadang hasilnya baru dapat dirasakan beberapa tahun mendatang. Dan publikasi ini disusun untuk mengikuti perkembangan yang terjadi tiap tahunnya sehingga nantinya ada evaluasi atau perbaikan untuk peningkatan program atau kebijaksanaan yang telah dilaksanakan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan publikasi ini, kami ucapkan terimakasih. Meskipun publikasi ini telah disusun dengan sebaikmungkin tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada kesalahan atau kekeliruan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun, kami harapkan guna penyempurnaan publikasi ini.

Tobelo, November 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Utara


Suswanto, SE, MM.
NIP. 19630923 198503 1 002

sengaja dikosongkan

<https://halutkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan	5
1.3. Sistematika Penulisan	5
BAB II URAIAN TEORI.....	7
2.1. Peraturan Pemerintah terkait IPM	8
2.2. Konsep Pembangunan Manusia	9
2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia.....	11
2.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia	12
BAB III METODOLOGI	13
3.1. Perkembangan Metodologi IPM.....	14
3.2. Alasan Perubahan Metodologi IPM	15
3.3. Keunggulan IPM Metode Baru	16
3.4. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia ...	17
3.5. Penghitungan IPM Metode Baru	19
BAB IV KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI	31
4.1. Geografis.....	32
4.2. Penduduk dan Ketenegakerjaan.....	33
4.3. Perekonomian	34
4.4. Kesehatan	36
4.5. Pendidikan	37

BAB V PEMBANGUNAN MANUSIA	39
5.1. Indeks Pembangunan Manusia.....	40
5.2. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia	52
5.3. Laju Pertumbuhan Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016 (persen).....	56
 BAB VI PENUTUP	 61
6.1. Kesimpulan	62
6.2. Saran.....	63
 DAFTAR PUSTAKA	 65
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru	18
Tabel 3.2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM	19
Tabel 5.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016.....	42
Tabel 5.2. Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016.....	44
Tabel 5.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016	46
Tabel 5.4. Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016 (persen)	52
Tabel 5.5. Laju Pertumbuhan Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016 (persen)	54
Tabel 5.6.. Nilai Reduksi <i>Shortfall</i> Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016	57
Tabel 5.7. Nilai Reduksi <i>Shortfall</i> Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016	59

sengaja dikosongkan

<https://halutkab.bps.go.id>

<https://halutkab.bps.go.id>

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dalam bahasa aslinya disebut dengan *Human Development Indeks* (HDI) merupakan pengukuran tingkat kesejahteraan suatu wilayah berdasarkan pada tiga aspek utama yang meliputi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah berdasarkan kriteria tertentu dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Sejak tahun 1969 Indonesia menerapkan *planned economy* dengan pola *growth first then distribution of wealth*. *Planned economy* ini menunjukkan keberhasilan terutama dilihat dari indikator makro ekonomi yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan pendapatan yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat pengangguran dan perbaikan sarana perekonomian.

Data ekonomi periode 1970-1980 mengenai ekonomi dan distribusi pendapatan terutama di negara yang tergolong dalam *Less Developing Country* (LDC), khususnya dinegara-negara yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesenjangan ekonomi menunjukkan semakin tinggi pendapatan

per kapita maka semakin terlihat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan miskin. Berdasarkan fakta tersebut muncul pertanyaan mengapa terjadi *trade off* antara pertumbuhan dan kesenjangan ekonomi dan berapa lama hal tersebut akan berlangsung. Kerangka pemikiran tersebut melandasi Hipotesis Kuznetz, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi yang positif antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesenjangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi korelasi negatif.

Adanya permasalahan tersebut maka melatarbelakangi *United Nations Development Programme* (UNDP) untuk mengembangkan indikator pembangunan manusia yang mampu menjawab permasalahan tersebut. UNDP kemudian merumuskan HDI yang mencakup 3 komponen dasar yang secara operasional dapat menghasilkan suatu ukuran untuk merefleksikan upaya pembangunan manusia di suatu wilayah, yaitu:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).

3. Standard kehidupan yang layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Pada perkembangannya, UNDP mengembangkan konsep dan metodologi dalam penghitungan IPM guna melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi selama periode 1990 sampai 2014 yaitu komponen angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah, PDB atau PDRB yang digunakan untuk menghitung kualitas hidup layak diganti dengan PNB atau PNRB, dan metode penghitungan yang dulunya menggunakan rata-rata aritmatika pada saat ini menggunakan rata-rata geometri.

Adapun alasan mengapa Indonesia menjadikan IPM sebagai metode untuk menghitung tingkat pembangunan yang telah terjadi karena adanya kesepakatan bersama masyarakat internasional untuk mencapai pembangunan milenium atau yang sering disebut dengan *Millenium Development Goals* (MDG's). Komitmen tersebut telah disepakati oleh para pemimpin dunia Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada bulan September 2000 yang memuat delapan butir pernyataan sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan dan pemberdayaan gender;
4. Menurunkan angka kematian anak;

5. Meningkatkan kesejahteraan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Adanya MDG's tersebut menuntut pemerintah Indonesia untuk memiliki alat hitung yang dapat menunjukkan ketercapaiannya butir-butir komitmen tersebut sehingga diadopsilah HDI yang kemudian menjadi IPM. Berjalannya waktu kemudian MDG's berubah menjadi Sustainable Development Goals (SDG's) yang memuat 17 tujuan utama.

1.2. Tujuan

Tujuan publikasi ini adalah untuk mengukur ketercapaian pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara melalui pengamatan komponen yang menjadi indikator penghitungan IPM yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pengguna data terkait pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara.

1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 disusun dengan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

- **BAB I** merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang dan tujuan penyusunan publikasi IPM

Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 serta sistematika kepenulisannya.

- **BAB II** memuat uraian teoritis mengenai peraturan pemerintah terkait manfaat/penggunaan IPM serta konsep pembangunan manusia.
- **BAB III** memuat metodologi penghitungan IPM dan komponen penyusunnya, sumber data, ruang lingkup dan keterbatasan IPM.
- **BAB IV** memuat gambaran wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang berisi informasi tentang kondisi geografis, ekonomi, penduduk dan ketenagakerjaan, pendidikan dan kesehatan.
- **BAB V** memuat uraian singkat mengenai IPM di Kabupaten Halmahera Utara.
- **BAB VI** memuat kesimpulan dan saran dari hasil uraian yang telah dilakukan.

<https://halutkab.bps.go.id>

BAB II
URAIAN TEORI

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Peraturan Pemerintah terkait IPM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP-RI) Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada pasal 1 poin 15 disebutkan bahwa Evaluasi Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah (EKPOD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat pelayanan umum dan daya saing daerah. Dalam hal ini, IPM digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tujuan akhir otonomi daerah.
2. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia No. 39/M.Kominfo/12/2008 tentang Daerah Ekonomi Maju dan Daerah Ekonomi Kurang Maju dalam penyelenggaraan penyiaran tersebut dalam pasal 2 bahwa IPM bersama dengan Indeks Geografis (IG), Indeks Demografi (ID), Indeks Ekonomi (IE), dan Indeks Bisnis (IB) digunakan untuk menghitung Indeks Potensi dan Kemajuan Daerah (IPKD) yang akan mengklasifikasikan suatu daerah tergolong maju atau kurang maju.

2.2. Konsep Pembangunan Manusia

United Nation Development Programme (UNDP) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Dalam konsep tersebut, penduduk ditempatkan sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principal means*) untuk mencapai tujuan itu. Seorang individu atau suatu keluarga lazimnya mempunyai banyak keinginan, baik yang muluk-muluk maupun yang sangat mendasar. Contoh keinginan yang mendasar adalah mereka berharap keluarganya dapat hidup sehat dan berumur panjang, tinggal di lingkungan yang sehat, terbebas dari berbagai wabah, serta memperoleh akses pada sanitasi dan air bersih. Individu tersebut menginginkan keluarganya memperoleh pendidikan dan pelatihan yang baik, serta mempunyai akses pada sumber daya ekonomi yang dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Individu tersebut berharap pula mampu membawakan diri dengan baik dalam pergaulan masyarakat, serta dapat hidup dalam suasana yang bebas dan mempunyai hak untuk menyuarakan kepentingannya. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada

manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia.

Konsep pembangunan manusia seperti diuraikan di atas berbeda dari konsep/paradigma pembangunan yang berkembang selama setengah abad terakhir. Beberapa yang terpenting diantaranya adalah: pembangunan ekonomi, kesejahteraan manusia, kebutuhan dasar manusia, dan pembangunan sumber daya manusia. Perbedaan pada paradigma pembangunan ekonomi disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi memang penting dalam pembangunan manusia. Meski demikian, bukti empiris menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menjamin pembangunan manusia. Masih banyak negara (atau wilayah) yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat namun tidak diikuti dengan pembangunan manusia yang seimbang, seperti di negara Asia Timur. Sebaliknya, terdapat banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pada tingkat sedang namun diikuti dengan pembangunan manusia yang mengesankan, misalnya Sri Lanka, Kosta Rika, serta Trinidad dan Tobago. Hal ini membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta merta menjamin pembangunan manusia.

Kemudian untuk konsep kesejahteraan manusia hanya melihat manusia sebagai pihak yang berhak memperoleh manfaat pembangunan, bukan sebagai peserta aktif pembangunan. Konsep kebutuhan dasar memfokuskan diri

pada sejumlah barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakat yang kurang beruntung, dan bukannya pilihan-pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Lalu konsep pembangunan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan kemampuan atau memberdayakan manusia, bukan pemanfaatan kemampuan tersebut. Sementara itu, konsep pembangunan manusia mencakup keseluruhan aspek yang telah disebutkan di atas. Dengan demikian, konsep pembangunan manusia mampu mencakup lebih baik berbagai segi dan kompleksitas kehidupan manusia dibandingkan konsep pembangunan yang berkembang selama ini.

2.3. Pengukuran Pembangunan Manusia

Seperti halnya dengan pendekatan pembangunan ekonomi, konsep pembangunan manusia ini juga terukur. Berdasarkan perspektif pembangunan seperti telah diuraikan di atas, pembangunan manusia tidak diukur hanya dari pendapatan semata, namun didapat dari indeks komposit yang disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Pada tahap awal penyusunan

indeks, pilihan diberikan pada tiga unsur penting/pilar utama/dimensi kehidupan manusia yaitu: kesehatan (*healthy*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standart of living*).

2.4. Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Adapun beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penghitungan IPM disuatu wilayah adalah sebagai berikut:

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pemerintah dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat.
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah juga dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

<https://halutkab.bps.go.id>

BAB III
METODOLOGI

BAB II

METODOLOGI

3.1. Perkembangan Metodologi IPM

Sejak IPM diperkenalkan pada tahun 1990, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM. Hingga pada tahun 2010, UNDP telah banyak melakukan perbaruan metodologi penghitungan IPM yang kemudian dilakukan penyempurnaan kembali pada tahun 2011 dan 2014.

Pada awalnya IPM dikenal sebagai indeks komposit tunggal yang terdiri dari tiga komponen indeks yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kemudian pada tahun 2010, komposisi IPM diubah sehingga mengandung dua unsur. Unsur pertama yaitu AHH, Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita. Unsur keduanya yaitu agregasi indeks yang menggunakan rata-rata geometrik, bukan lagi rata-rata aritmetik. Lalu di tahun 2011, UNDP menyempurnakan penghitungan IPM dengan mengganti tahun dasar PNB per kapita dari yang semula berdasarkan tahun 2008 menjadi tahun 2005. Terakhir, UNDP kembali menyempurnakan penghitungan IPM pada tahun 2014. Pertama, mengganti tahun dasar PNB per kapita dari tahun 2005 menjadi tahun

2011. Kedua, mengubah kembali metode penghitungan yang sebelumnya menggunakan rata-rata geometrik kembali ke rata-rata aritmetik. Perubahan metodologi penghitungan IPM ini diikuti oleh beberapa negara seperti India di tahun 2011, Filipina di tahun 2012, dan Cina di tahun 2013.

3.2. Alasan Perubahan Metodologi IPM

Beberapa upaya perubahan metode menghitung IPM pada dasarnya merupakan sebuah konsekuensi logis adanya penyesuaian kondisi sosial dan perekonomian dunia. Tidak hanya itu, beberapa kali perubahan formula dalam mendapatkan angka IPM juga terkait erat dengan perkembangan riset dan teknologi dalam menganalisis kualitas pembangunan manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun pemerataan pendapatan masyarakat.

Bila diuraikan setidaknya terdapat tiga poin penting yang melandasi perubahan metodologi penghitungan IPM yang dilakukan oleh UNDP dan mendasari penghitungan IPM oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. AMH sudah tidak relevan bila digunakan kembali sebagai ukuran pendidikan yang secara utuh sebab sudah tidak tepat lagi dalam menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat

membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik.

2. PDB per kapita tidak lagi mampu menggambarkan pendapatan masyarakat antar daerah atau antar wilayah. Hal ini dikarenakan PDB tidak hanya memperlihatkan siklus perekonomian yang hanya dilakukan oleh masyarakat secara mikro, tetapi juga menggambarkan kondisi perekonomian yang lebih besar disumbang oleh sektor lain, misalnya investasi yang notabene memiliki siklus yang hanya menyentuh kondisi perekonomian beberapa masyarakat saja.
3. Penghitungan IPM kembali menggunakan rata-rata geometrik sebab penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

3.3. Keunggulan IPM Metode Baru

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama-sama penting.

3.4. Implementasi IPM Metode Baru di Indonesia

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (e_0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.

3. PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 3.1. Perbandingan Metode Lama dan Metode Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
1	2	3	4	5
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregat	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3}(I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengetahuan})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengetahuan}}$	

Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing-masing indikator menggunakan standar UNDP untuk

keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut:

Tabel 3.2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
1	2	3	4	5	6
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP\$)	10.007.436* (Rp)	107.721 (PPP\$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua.

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

3.5. Penghitungan IPM Metode Baru

IPM merupakan indeks komposit dari tiga dimensi pembangunan manusia yaitu dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, dan dimensi pengeluaran (standar hidup layak).

Penghitungan Komponen IPM

1) Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. AHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya. AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena AHH berhubungan erat dengan meningkatnya peluang lamanya kehidupan seseorang. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat mengenai cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis dapat memperpanjang usia hidup atau harapan untuk hidup seseorang. Peningkatan usia hidup juga indikator dari semakin majunya tingkat sosial ekonomi masyarakat sehingga AHH mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

AHH dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*) dengan input data orang/penduduk yang meninggal berdasarkan kelompok umur. Penggunaan tabel kematian berhubungan dengan kohort peristiwa pada suatu waktu tertentu. Selain dengan tabel kematian, AHH dapat dihitung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Penghitungan dengan program ini biasanya disebut perhitungan tidak langsung karena menggunakan input data jumlah wanita usia 15 - 49 tahun per kelompok umur lima tahunan.

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup minimal, yaitu 20 tahun

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup maksimal, yaitu 85 tahun

2) Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan diukur dengan dua indikator, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah - RLS (*Mean Years of Schooling - MYS*)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam penghitungannya, RLS mengasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun, atau dengan kata lain konstan.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan

RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Indeks RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah minimal, yaitu 0

RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah maksimal, yaitu 15

Harapan Lama Sekolah - HLS (*Expected Years of Schooling - EYS*)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar.

Penghitungan HLS menggunakan asumsi bahwa kemungkinan anak untuk tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

HLS secara langsung dapat mengukur pembangunan sistem pendidikan di setiap jenjang, sehingga mampu menggambarkan pada level mana yang menjadi prioritas pemerintah.

Indeks HLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah minimal, yaitu 0

HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah maksimal, yaitu 18

Faktor Koreksi Pesantren (FKP)

FKP merupakan komponen baru dalam penghitungan angka IPM yang tercakup dalam HLS. Hal ini dikarenakan HLS menyesuaikan dengan kondisi Indonesia yang terdapat anak sekolah sekaligus mengenyam pondok pesantren sehingga perlu memperhitungkan lama mukim atau lama mondok dalam penghitungan rasio murid (santri) bermukim serta jumlah yang sedang bersekolah dan bermukim (mondok).

Tahapan dalam menghitung FKP adalah dengan merasiokan jumlah santri bermukim dengan jumlah santri seluruhnya sehingga diperoleh rasio santri mukim.

$$Rasio Santri Mukim = \frac{Jumlah\ bermukim}{Jumlah\ santri\ seluruhnya}$$

Kemudian dicari jumlah santri yang bersekolah dan bermukim dengan mengalikan Rasio Santri Mukim dengan jumlah santri yang bersekolah.

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim} \\ & = \text{Rasio Santri Mukim} \times \text{jumlah santri sekolah} \end{aligned}$$

Terakhir untuk memperoleh Faktor Koreksi Pesantren didapat dengan merasiokan Jumlah Santri Sekolah dan Mukim dengan jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah dengan 1.

$$FKP = \frac{\text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Kemudian untuk memperoleh indeks pengetahuan digunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{RLS} + I_{HLS}}{2}$$

3) Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul pada setiap level provinsi hingga kabupaten/kota.

Agar tidak terpengaruh fluktuasi atau volatilitas harga setiap tahunnya, maka rata-rata pengeluaran per kapita dikonstantkan sehingga menggambarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil. Caranya dengan membuat rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100.

Perhitungan *Power Purchasing Parity* (PPP)/paritas daya beli pada metode lama menggunakan 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung nilai PPP. Namun dengan metode yang terbaru penghitungan PPP mencakup 96 komoditas, dengan 66 komoditas merupakan komoditas berupa makanan dan sisanya sebanyak 30 jenis komoditas merupakan barang non-makanan.

Pada metode lama, *share* 27 komoditas terus menurun dari sebesar 37,52 persen di tahun 1996 menjadi 24,66 persen di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 27 komoditas tersebut perlu ditambah agar setidaknya telah mencapai syarat kecukupan untuk digunakan dalam menghitung angka PPP sebagai bahan baku penghitungan angka pengeluaran per kapita riil.

Formula yang digunakan dalam penghitungan angka PPP adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

p_{ik} : harga komoditas i di wilayah referensi, yaitu Jakarta Selatan

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

m : jumlah komoditas

Sementara itu dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan

dihitung menggunakan indeks pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\text{maks}}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\text{min}})}$$

Keterangan:

$\text{pengeluaran}_{\text{min}}$: pengeluaran minimal per kapita yang disesuaikan, yaitu Rp 10.007.436,-

$\text{pengeluaran}_{\text{maks}}$: pengeluaran maksimal per kapita yang disesuaikan, yaitu Rp 26.572.352,-

Penghitungan IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

Laju Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Pertumbuhan IPM yang bernilai positif menunjukkan terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun sebelumnya, semakin besarnya menunjukkan pertumbuhan yang terjadi semakin cepat. Begitu sebaliknya jika nilai pertumbuhan IPM negatif menunjukkan terjadi penurunan nilai IPM dibandingkan tahun sebelumnya, semakin besar nilainya menunjukkan penurunan yang terjadi semakin besar. Istilah yang biasanya digunakan dalam pertumbuhan adalah terjadinya pertumbuhan secara cepat atau terjadi pelambatan.

Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengklasifikasikan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah diperlukan sebuah ukuran yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$)
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)

- Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Rendah ($\text{IPM} < 60$)

Reduksi *Shortfall*

Lebih lanjut, angka IPM suatu daerah menunjukkan jarak yang harus ditempuh (*shortfall*) untuk mencapai nilai maksimum, yaitu 100. Artinya, nilai tersebut mengukur keberhasilan dengan melihat apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai. Angka ini dapat diperbandingkan antar daerah sehingga upaya mengurangi angka *shortfall* merupakan tantangan bagi setiap daerah. Selain itu, *shortfall* dapat digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan komponen IPM.

Penghitungan *shortfall* dapat menghasilkan perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu. Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM lebih cepat. Asumsi yang digunakan dalam pengukuran ini adalah laju perubahan tidak bersifat linier, laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi. Nilai reduksi *shortfall* juga dapat dihitung masing-masing komponen IPM. Formula penghitungan reduksi *shortfall* adalah sebagai berikut:

$$r = \left(\frac{\text{IPM}_{t+n} - \text{IPM}_t}{\text{IPM}_{ref} - \text{IPM}_t} \times 100 \right)^{1/n}$$

Keterangan:

IPM_t : IPM tahun awal (tahun referensi).

IPM_{t+n} : IPM tahun akhir (tahun yang dihitung).

IPM_{ref} : IPM referensi ideal, yaitu 100.

Ada empat kategori reduksi *shortfall* pertahun yaitu :

1. Sangat lambat jika nilainya kurang dari 1,3.
2. Lambat jika nilainya berada diantara 1,3 sampai 1,5.
3. Menengah jika nilainya berada diantara 1,5 sampai 1,7.
4. Cepat jika nilainya lebih besar dari 1,7.

Semakin besar reduksi short fall pertahun maka semakin besar kemajuan yang dicapai daerah tersebut dalam periode itu.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan IPM dalam publikasi ini berasal dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Selain data tersebut, digunakan pula data pendukung yang berasal dari sumber data lain seperti data PDRB dan data Halmahera Utara Dalam Angka dari berbagai tahun.

Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Indikator tunggal IPM merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah, sekaligus mengukur keberhasilan usaha pemberdayaan kemampuan sosial dan ekonomi

penduduk wilayah tersebut. Selain mampu mengukur peningkatan kualitas kesehatan yang dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (AHH), IPM juga mencakup pengukuran tingkat pendidikan dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta kemampuan daya beli masyarakat.

Pengukuran IPM, khususnya Kabupaten Halmahera Utara disajikan dalam rentang waktu 2014 - 2016. Untuk melihat perkembangan serta aspek keterbandingan dengan kabupaten/kota lainnya, baik dari segi waktu maupun tempat, dilakukan perbandingan dengan melihat kondisi pada tahun sebelumnya dengan tetap berfokus pada pembahasan kondisi IPM Kabupaten Halmahera Utara.

IPM sebagai indikator tunggal dan indeks komposit sederhana masih mempunyai keterbatasan dalam penggunaannya, yakni kurang merefleksikan pencapaian sasaran program dengan dimensi pemberdayaan manusia. IPM hanya tepat digunakan sebagai instrumen perencanaan bila didukung dengan indikator tunggal dari sektor pembangunan lainnya.

Keterbatasan lainnya adalah besaran angka IPM yang tidak memiliki besaran tertentu, kecuali perbandingan antar wilayah dan waktu. Oleh karena itu, analisis yang bisa dilakukan selalu memakai kerangka keterbandingan waktu dan daerah.

<https://halitkab.bps.go.id>

BAB IV
KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

BAB IV

KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI

4.1. Geografis

Kabupaten Halmahera Utara secara geografis terletak antara 10.57° - 20,00° Lintang Utara dan 128,17° - 128,18° Bujur Timur. Secara Administratif, Halmahera Utara mempunyai wilayah batas, yaitu:

1. Batas Utara: Samudra Pasifik dan Kabupaten Pulau Morotai.
2. Batas Timur: Kecamatan Wasile (Kabupaten Halmahera Barat) dan Laut Halmahera.
3. Batas Selatan: Kecamatan Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat).
4. Batas Barat: Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo (Kabupaten Halmahera Barat).

Kabupaten Halmahera Utara memiliki luas wilayah seluas 22.507,32 km², dengan luas daratan sebesar 4.951,61 km² (22 persen). Sedangkan luas wilayah lautnya mencapai 17.555,71 km² (78 persen).

Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 desa, dimana 121 desa diantaranya merupakan desa pantai. Kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Kao Barat dengan luas 596,70 km², sedangkan

kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Tobelo dengan luas 33 km².

Bila dilihat dari jumlah desa, Kecamatan Malifut memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 22 desa yang terdiri dari 10 desa pantai dan 12 desa bukan pantai. Sedangkan kecamatan yang memiliki desa paling sedikit adalah Tobelo Barat dengan jumlah desa sebanyak 5 desa yang tergolong dalam desa pantai.

Dilihat dari kondisi cuacanya, rata-rata temperatur udara di Kabupaten Halmahera Utara berkisar antara 25,6° C - 26,4° C. Adapun rata-rata kecepatan angin antara 2 - 5 knot.

4.2. Penduduk dan Ketenagakerjaan

Penduduk merupakan obyek utama yang diharapkan peningkatan kualitasnya dalam suatu pembangunan nasional. Selain memiliki peran sebagai obyek pembangunan nasional, penduduk juga memiliki peranan sebagai subyek dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut. Penduduk sebagai subyek dalam pembangunan nasional memiliki arti bahwa merekalah penggerak utama suatu program yang telah dicanamkan.

Penduduk yang banyak dan berkualitas tentunya akan menjadi modal besar bagi pemerintah daerah yang ingin mengembangkan daerahnya. Secara sederhana, penduduk yang banyak tentunya akan menghasilkan pendapatan yang banyak pula. Namun demikian, pada era modern seperti

sekarang ini penduduk yang banyak tidak serta merta menjadi keuntungan bagi wilayah tersebut karena penduduk yang banyak tetapi tidak berkualitas justru akan menjadi permasalahan bagi daerah tersebut. Ditambah pada saat sekarang ini telah banyak usaha ekonomi yang telah menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin, sehingga tidak sedikit telah menyebabkan permasalahan pengangguran.

Penduduk Halmahera Utara pada tahun 2016 tercatat sebanyak 183.596 penduduk yang terdiri dari 93.806 laki-laki dan 89.790 perempuan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kecamatan Tobelo yaitu sebanyak 37.468 penduduk, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat pada Kecamatan Tobelo Barat dengan jumlah sebanyak 5.813 penduduk. Jika dilihat dari perbandingan antara jumlah laki-laki dan perempuan, *sex ratio* seluruh Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara lebih dari 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada jumlah perempuan pada setiap kecamatan.

4.3. Perekonomian

Pada tahun 2016, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Halmahera Utara mencapai 4.451.544,0 juta rupiah, atau meningkat sebesar 7,96 persen dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 4.123.145,8 juta rupiah. Lapangan usaha yang memiliki kontribusi

terbesar terhadap PDRB adalah sektor pertambangan dan penggalian dengan besarnya sumbangsih sebesar 27,29 persen atau sebesar 1.214.623,0 juta rupiah, sumbangsih ini turun jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 29.03 persen . Sedangkan sumbangsih terkecil terjadi pada sektor pengadaan real estate yaitu sebesar 0,05 persen atau 2.907,6 juta rupiah.

Bila dilihat berdasarkan pengelompokan tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier maka terlihat sektor primer masih mendominasi perekonomian Kabupaten Halmahera Utara dengan sumbangsih 51,97 persen. Angka ini menurun jika dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 53,23 persen. Sedangkan sektor sekunder dan tersier memiliki sumbangsih sebesar 10,21 dan 37,82 persen.

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010, PDRB Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 sebesar 3.350.213,7 juta rupiah. Angka PDRB 2016 mengalami peningkatan jika dibandingkan PDRB 2015 yang hanya mencapai 3.350.213,7 juta rupiah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 mencapai 4,03 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara mengalami perlambatan karena pada tahun 2015 pertumbuhan mencapai 6,44 persen. Perlambatan ekonomi memiliki arti bahwa laju pertumbuhan

ekonomi pada tahun tersebut tidak tumbuh secepat pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya.

4.4. Kesehatan

Kesehatan merupakan hal penting yang tidak bisa dipisahkan jika berbicara terkait kualitas penduduk disuatu daerah. Suatu daerah yang baik tentunya memiliki kualitas kesehatan penduduknya yang baik pula sehingga dengan begitu kekayaan alam dan kebijakan yang telah diterapkan dapat dinikmati. Selain itu, penduduk yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih baik jika dibandingkan penduduk yang tidak sehat atau sakit-sakitan. Proses untuk mewujudkan kualitas kesehatan penduduk yang baik tentunya harus didukung dengan ketersediaan fasilitas dan sarana kesehatan. Tidak hanya itu, kualitas kesehatan yang baik akan tercapai juga jika didukung tenaga medis yang berkualitas dan biaya kesehatan yang terjangkau.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Halmahera Utara tergolong sudah cukup baik. Di Kabupaten Halmahera utara terdapat rumah sakit sebanyak 2, poliklinik atau balai pengobatan sebanyak 3, puskesmas sebanyak 19, puskesmas pembantu 56, dan posyandu sebanyak 280. Fasilitas dan sarana kesehatan tersebut juga didukung oleh 7 dokter spesialis, 44 dokter umum, 6 dokter gigi, 139 bidan, 192 perawat, 23 ahli gizi dan 11 bagian sanitasi.

Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara juga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan cara memberikan bantuan jaminan kesehatan untuk warganya yang kurang mampu. Kebijakan ini tentunya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara. Namun demikian, berbicara tentang kesehatan bukanlah hal yang instan dimana perubahannya dapat langsung dilihat hasilnya namun diperlukan waktu jangka panjang untuk hasilnya. Oleh karena itu, program dan kebijakan terkait kesehatan perlu digalakan sepanjang waktu dan terus ditingkatkan.

4.5. Pendidikan

Pendidikan memiliki peranan yang penting dalam menyukseskan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada pendidikan akan membuat seseorang mampu berpikir secara dewasa dan berkeinginan untuk maju. Keinginan yang ingin maju dan memperoleh kehidupan yang lebih baik, akan memotivasi orang tersebut untuk selalu berkembang dan berkarya.

Adanya pendidikan juga dapat memberikan bekal ketrampilan dan kemampuan sehingga semakin tinggi pendidikannya maka akan semakin banyak peluang kerjanya dan akan semakin spesialisasi kemampuannya. Oleh karena itu, biasanya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang

maka dia akan memiliki kecenderungan untuk memperoleh pendapatan yang semakin tinggi pula.

Adanya upaya untuk melakukan pemerataan pendidikan melalui peningkatan fasilitas dan sarana prasarana pendidikan, akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang ada. Pada tahun 2016 diketahui bahwa rasio jumlah murid terhadap SD yang ada sebesar 103, yang berarti bahwa rata-rata setiap SD yang ada memiliki jumlah murid sebanyak 103 murid. Sedangkan, jenjang MI sebesar 141, jenjang SMP sebesar 121, jenjang MTs sebesar 100, jenjang SMA sebesar 242, jenjang MA sebesar 98, dan jenjang SMK sebesar 144.

Pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara juga didukung dengan ketersediaan guru yang cukup memadai. Adapun beban kerja setiap guru SD di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 15 murid, beban kerja setiap guru MI sebanyak 11 murid, beban kerja setiap guru SMP sebanyak 11 murid, beban kerja setiap guru MTs sebanyak 7 murid, beban kerja setiap guru SMA sebanyak 18 murid. beban kerja setiap guru MA sebanyak 7 murid dan beban kerja setiap guru SMK sebanyak 18 murid. Secara umum beban kerja guru diberbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Halmahera Utara telah menunjukkan ketercukupan jumlah guru yang ada. Namun demikian, analisis beban kerja guru tersebut belum bisa menganalisis terkait kuantitas ideal dan kualitas dari tenaga pengajar yang ada.

<https://halutkab.bps.go.id>

BAB V
PEMBANGUNAN MANUSIA

BAB V

PEMBANGUNAN MANUSIA

5.1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah. Adapun tujuan utama pembangunan menurut UNDP yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif. Tingkat pembangunan suatu daerah dapat diukur melalui tiga pendekatan yaitu kualitas kesehatan, tingkat pendidikan dan besarnya pendapatan per kapita penduduk wilayah tersebut. Ketiga indikator tersebut dihitung melalui Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (AHS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan besarnya pendapatan yang didekatkan melalui besarnya pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

IPM biasanya digunakan untuk melakukan penilaian terkait sejauh mana pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan manfaat yang besar terhadap kesejahteraan penduduk daerah tersebut. IPM juga digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesuksesan pembangunan di wilayah tersebut yang nantinya digunakan

sebagai dasar dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat.

Proses pembangunan yang telah dilaksanakan perlu diberikan apresiasi dan penilaian untuk kemudian dilakukan evaluasi dan peningkatan baik kualitas maupun kuantitas pembangunan yang akan dilaksanakan. Pembangunan yang baik dilaksanakan secara menyeluruh dan merata sehingga dapat dirasakan oleh semua masyarakat. Pembangunan juga hendaknya dilaksanakan disemua bidang yang berkaitan dengan masyarakat sehingga nantinya akan terjadi keseimbangan. Salah satu metode untuk melakukan penilaian tersebut biasanya digunakan IPM yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian kinerja pembangunan diberbagai bidang baik secara terpisah maupun gabungan.

IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 sebesar 66,02. IPM Kabupaten Halmahera Utara tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. Jika dibandingkan dengan 6 tahun yang lalu atau tepatnya tahun 2010, IPM Kabupaten Halmahera Utara hanya sebesar 61,46. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 0.98 poin dari yang awalnya 65,04. Berdasarkan IPM tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perbaikan kualitas dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari tahun ke tahun. Menurut UNDP, dengan IPM 66,02

maka Kabupaten Halmahera Utara tergolong kategori menengah ke atas.

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 masih menempati posisi ketiga se provinsi Maluku Utara. Adapun posisi pertama ditempati oleh Kota Ternate dengan IPM sebesar 77,80 dan posisi kedua ditepati Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 68,37. Sedangkan posisi kesimbangan ditempati oleh Kabupaten Morotai dengan IPM 59,87 dan posisi kesepuluh atau terakhir ditempati oleh Kabupaten Taliabu dengan IPM 58,66.

Tabel 5.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	62,06	62,97	63,83
8202	Halmahera Tengah	61,49	62,07	63,05
8203	Kepulauan Sula	60,18	60,50	61,25
8204	Halmahera Selatan	60,34	61,26	62,17
8205	Halmahera Utara	64,18	65,04	66,02
8206	Halmahera Timur	63,26	63,99	64,92
8207	Pulau Morotai	58,34	59,27	59,87
8208	Pulau Taliabu	57,31	58,26	58,66
8271	Kota Ternate	77,15	77,64	77,80
8272	Kota Tidore Kepulauan	66,76	67,45	68,37
8200	Maluku Utara	65,18	65,91	66,63

IPM Kabupaten Halmahera selama ini masih berada dibawah IPM provinsi yang berarti bahwa pembangunan permbangunan level provinsi lebih baik jika dibandingkan dengan IPM Kabupaten Halmahera Utara. Namun demikian, jika dilihat dari pertumbuhannya maka Laju IPM Kaupaten Halmahera Utara lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan IPM maluku Utara. Hal ini berarti bahwa jika Kabupaten Halmahera Utara telah melakukan berbagai macam pembangunan maka pada tahun tertentu IPM Kabupaten Halmahera Utara akan lebih besar

IPM dihitung berdasarkan indikator Angka Harapan Hidup (kesehatan), Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Pendidikan (pendidikan), serta daya beli masyarakat atau *perchasing power of parity* (ekonomi). Dua diantara indikator tersebut merupakan indikator sosial yang berarti perubahan yang terjadi akibat adanya suatu kebijakan pada indikator tersebut tidak dapat dilihat secara langsung. Kebijakan pembangunan pada kedua indikator tersebut baru akan terasa beberapa tahun kemudian.

Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 selama 68,86 tahun, naik 1,09 tahun jika dibandingkan tahun 2015. Dari tahun ke tahun AHH penduduk Kabupaten Halmahera Utara mengalami kenaikan. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan penduduk selama bebera tahun terakhir yang

menyebabkan mereka memiliki harapan hidup lebih lama. Program pemerintah seperti pemberian bantuan untuk berobat bagi penduduk yang tidak mampu melalui BPJS, menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka harapan hidup penduduk Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 5.2. Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016

Komponen	Nilai		
	2014	2015	2016
1	2	3	4
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,67	68,77	68,86
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,29	12,69	13,06
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,98	8,06	8,35
Pengeluaran per Kapita (Ribu Rupiah)	6.746	6.957	7.110
Indeks Pembangunan Manusia	64,18	65,04	66,02

Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Halmehera Utara yang didekati melalui Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. HLS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2017 sebesar 13,06 tahun yang berarti bahwa harapan pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara sudah mencapai perguruan tinggi yaitu tepatnya jenjang Diploma 1 (D1). Tingginya harapan pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Halmahera Utara mulai memahami tentang pentingnya pendidikan.

Tingkat pendidikan yang didekati dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2016 peningkatan rata-rata lama pendidikan cukup tinggi yaitu dari yang awalnya 8,06 tahun pada tahun 2015 menjadi 8,35 tahun pada tahun 2016. Angka RLS yang menunjukkan 8,35 tahun menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara berpendidikan SMP kelas 2. Meskipun tingkat pendidikan ini masih tergolong rendah karena belum mencapai pendidikan wajib 9 tahun, namun dengan melihat trend rata-rata pendidikan pendidikan yang semakin meningkat dengan cepat maka tidak sulit jika target 9 tahun tersebut akan dicapai dalam beberapa tahun kedepan. Sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan terjangkau biaya pendidikan dapat meningkatkan kesadaran dan minat penduduk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang didekati melalui pengeluaran per kapita menunjukkan pendapatan yang semakin meningkat. Pada tahun 2016, pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara rata-rata sebesar 7,11 juta rupiah atau dapat pula dikatakan bahwa pendapatan per kapita per bulan penduduk Kabupaten Halmahera Utara sebesar 592.500 rupiah. Angka tersebut jauh di atas garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2016 yang mencapai 208.832 rupiah per kapita per bulan. Hal

ini menunjukkan bahwa secara rata-rata banyak penduduk di Kabupaten Halmahera yang secara pendapatan tidak tergolong penduduk miskin. Konsekuensi dari hal ini adalah tingkat kesehatan juga akan naik karena kebutuhan primer bisa dipenuhi dengan baik.

Tabel 5.3. Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/ Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2016

Prov/Kab/Kota	AHH (tahun)	HLS (tahun)	RLS (tahun)	Pengeluaran per Kapita (ribu rupiah)
2	3	4	5	
Halmahera Barat	65,45	13,05	7,86	7.076
Halmahera Tengah	62,60	12,70	8,14	7.481
Kepulauan Sula	62,50	12,23	7,96	6.741
Halmahera Selatan	65,11	12,31	7,42	6.894
Halmahera Utara	68,86	13,06	8,35	7.110
Halmahera Timur	67,67	12,48	7,77	7.560
Pulau Morotai	66,13	11,92	6,88	5.888
Pulau Taliabu	61,20	11,73	7,42	6.208
Kota Ternate	70,17	15,06	11,13	12.643
Kota Tidore Kepulauan	68,54	13,74	9,11	7.772
Maluku Utara	67,51	13,45	8,52	7.545

Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota dapat dilihat pada

tabel 5.3. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada semua komponen yang menyusun IPM, hampir semua memiliki nilai kurang dari nilai provinsi kecuali pada komponen harapan hidup yang memiliki nilai lebih tinggi 1,35 tahun. Lebih besarnya nilai harapan hidup penduduk Kabupaten Halmahera Utara dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara lebih baik dibandingkan tingkat kesehatan secara provinsi. Jika diperingkat secara provinsi maka harapan hidup Kabupaten Halmahera Utara menempati peringkat kedua setelah Kota Ternate dengan angka harapan hidup sebesar 70,17 tahun. Sedangkan angka harapan hidup terkecil terdapat pada Kabupaten Taliabu dengan AHH sebesar 61,20 tahun.

Tingkat kesehatan Kabupaten Halmaera Utara memiliki nilai terbaik kedua se-provinsi dan lebih besar dari nilai AHH provinsi menunjukkan bahwa selama ini program yang telah dijalankan pemerintah daerah dalam hal kesehatan telah berjalan baik. Peningkatan kesehatan melalui penyediaan sarana kesehatan dan tenaga medis yang memadahi seluruh wilayah. Selain itu, program-program pemerintah daerah seperti bantuan BPJS gratis untuk warga kurang mampu juga perlu diperbanyak dan diawasi pendistribusiannya sehingga tepat sasaran, dengan begitu diharapkan tingkat kesehatan penduduk Kabupaten

Halmahera Utara akan meningkat sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup mereka.

HLS Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 memiliki nilai yang lebih kecil jika dibandingkan HLS Provinsi Maluku Utara yaitu 13,06 tahun dibanding 13,45 tahun. Namun jika dilihat secara jenjang pendidikan maka harapan lama sekolah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara memiliki harapan lama sekolah yang sama yaitu pada jenjang Diploma 1 (D1). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Kabupaten Halmahera Utara tergolong tinggi. Jika diperingkat secara provinsi maka harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Halmahera Utara menempati peringkat ketiga setelah Kota Ternate dengan HLS sebesar 15,06 tahun dan Kota Tidore Kepulauan dengan HLS sebesar 13,74 tahun. Sedangkan HLS terkecil terdapat pada Kabupaten Taliabu dengan HLS sebesar 11,73 tahun.

Komponen pendidikan lainnya yaitu RLS, menunjukkan bahwa rata-rata lama pendidikan Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 juga memiliki lebih kecil jika dibandingkan RLS Provinsi Maluku Utara yaitu 8,35 tahun dibanding 8,52 tahun. Namun jika dilihat secara jenjang pendidikan maka rata-rata lama sekolah antara Kabupaten Halmahera Utara dan Provinsi Maluku Utara memiliki rata-rata jenjang pendidikan yang sama yaitu pada jenjang SMP kelas 2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat

pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara tidak berbeda jauh dengan rata-rata jenjang pendidikan penduduk Provinsi Maluku Utara. Jika diperingkat secara provinsi maka rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Halmahera Utara menempati peringkat ketiga setelah Kota Ternate dengan RLS sebesar 11,13 tahun dan Kota Tidore Kepulauan dengan RLS sebesar 9,11 tahun. Sedangkan RLS terkecil terdapat pada Kabupaten Taliabu dengan RLS sebesar 6,88 tahun.

Berdasarkan kedua komponen penyusun tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara yaitu HLS dan RLS menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara sudah baik, hanya tertinggal dari Kota Ternate dan Tidore kepulauan. Hal tersebut dapat dipahami mengingat Kota Ternate merupakan pusat ekonomi dan administrasi Provinsi Maluku Utara sehingga penduduknya telah memahami pentingnya pendidikan. Selain itu, pendidikan di Kota Ternate juga didukung dengan adanya sarana dan fasilitas pendidikan yang memadai ditambah tenaga pendidikan yang berkualitas. Sedangkan Kota Tidore Kepulauan memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Halmahera Utara karena letak Kota Tidore Kepulauan yang tidak jauh dari Kota Ternate sehingga tidak sedikit penduduk Kota Tidore Kepulauan yang bersekolah ke Kota Ternate.

Selain itu, fasilitas dan tenaga kerja pendidikan di Kota Tidore Kepulauan juga cukup mendukung.

Pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang didekatkan dengan pengeluaran per kapita per tahun pada tahun 2016 sebesar 7,11 juta rupiah. Pengeluaran tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tingkat pengeluaran penduduk Kabupaten Halmahera Utara secara keseluruhan yang mencapai 7,545 juta rupiah per kapita per tahun. Jika diperingkat secara provinsi maka tingkat pengeluaran Kabupaten Halmahera Utara menepati posisi ke lima setelah Kota Ternate yang memiliki pengeluaran per kapita per tahun sebesar 12,643 juta, Kota Tidore Kepulauan sebesar 7,772 juta rupiah, Kabupaten Halmahera Timur sebesar 7,56 juta rupiah, dan Kabupaten Halmahera Tengah 7,481 juta rupiah. Sedangkan kabupaten yang memiliki pengeluaran terkecil yaitu Kabupaten Talibu dengan jumlah 6,208 juta rupiah pengeluaran per kapita per tahun.

Kabupaten Halmahera Utara memiliki pengeluaran per kapita per tahun yang tidak begitu besar jika dibandingkan beberapa wilayah lain termasuk beberapa wilayah yang untuk kategori lain biasanya berada di bawah Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut diidentifikasi disebabkan karena banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Halmehara Utara dibandingkan kabupaten lain sehingga jika dihitung per kapita maka nilainya akan menjadi kecil. Beberapa contoh

diantaranya Kabupaten Halmahera Timur yang jumlah penduduknya sebanyak 87.680 jiwa dengan PDRB sebesar 2.525,51 miliar rupiah dan Kabupaten Halmahera Tengah yang jumlah penduduknya sebanyak 51.315 jiwa dengan PDRB sebesar 1.769,30 miliar rupiah, tentunya akan memiliki pengeluaran per kapita yang lebih besar dari Kabupaten Halmahera Utara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 183.596 jiwa dengan PDRB sebesar 4 451.54 miliar rupiah. Selain itu besarnya pengeluaran juga bisa dipengaruhi oleh biaya hidup yang berbeda-beda di masing-masing wilayah.

Upaya yang dapat pemerintah lakukan untuk dapat meningkatkan nilai IPM dari komponen pengeluaran yaitu beberapa diantaranya dengan meningkatkan PDRB, menjaga pertumbuhan penduduk dan menjaga kestabilan harga di Kabupaten Halmahera Utara. Peningkatan PDRB dapat dilakukan dengan mendorong ketersediaannya lapangan usaha dan memberikan bantuan disektor strategis sehingga bisa menggerakkan perekonomian. Selain itu, peningkatan PDRB dapat juga dilakukan dengan melakukan peningkatan pengeluaran pemerintah daerah yang penggunaannya untuk kepentingan masyarakat. Pengontrolan jumlah penduduk dapat dilakukan dengan menyosialisasikan jumlah penduduk ideal atau bantuan khusus untuk anak pertama dan kedua sehingga mendorong masyarakat untuk memiliki anak yang tidak terlalu banyak. Penjagaan harga dapat dilakukan dengan

mengontrol harga, memberikan subsidi biaya produksi dan menjaga stok pasar supaya tidak kekurangan atau kelebihan.

5.2. Laju Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pembangunan suatu daerah dari waktu ke waktu dapat dilihat dari pertumbuhan IPMnya. Pertumbuhan IPM akan menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya informasi ini dapat dijadikan evaluasi tahunan terkait kinerja dan keefektifan program yang telah dilaksanakan.

Tabel 5.4. Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016 (persen)

Kode	Prov/Kab/Kota	Pertumbuhan IPM		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	0,96	1,46	1,36
8202	Halmahera Tengah	0,98	0,94	1,58
8203	Kepulauan Sula	0,67	0,53	1,24
8204	Halmahera Selatan	0,71	1,53	1,48
8205	Halmahera Utara	0,59	1,34	1,50
8206	Halmahera Timur	0,87	1,16	1,45
8207	Pulau Morotai*	0,64	1,60	1,01
8208	Pulau Taliabu**	0,80	1,65	0,68
8271	Kota Ternate	0,61	0,63	0,21
8272	Kota Tidore Kepulauan	0,78	1,02	1,37
8200	Maluku Utara	0,63	1,11	1,10

Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara bertanda positif semua yang berarti selama periode 2014 sampai 2016 telah terjadi kenaikan kualitas pembangunan manusia di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara. Selama periode tersebut, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan IPM Provinsi Maluku Utara. Hanya pada tahun 2014 saja yang laju pertumbuhannya lebih lambat.

Pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara dari 2014 sampai 2016 selalu bernilai positif dan terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut telah terjadi perbaikan pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara yang perubahannya semakin signifikan.

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara menempati posisi terakhir atau yang paling lambat dengan laju pertumbuhan sebesar 0,59 persen. Perlambatan tersebut disebabkan karena tidak begitu signifikannya perubahan yang terjadi dibidang kesehatan dan pendidikan karena pemerintah saat itu sedang dihadapkan pada masa pesta politik 5 tahunan sehingga kurang fokus. Sedangkan laju pertumbuhan IPM tercepat terjadi pada Kabupaten Halmahera Tengah yaitu sebesar 0,98 persen.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara mencapai 1,34 persen sehingga menempatkannya pada posisi kelima Kabupaten/Kota yang

memiliki laju pertumbuhan IPM tercepat di Provinsi Maluku Utara. Sedangkan pada tahun 2016 terlihat laju pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara kembali mengalami percepatan dibandingkan laju pertumbuhan tahun sebelumnya. Jika diperingkat secara provinsi, laju pertumbuhan Kabupaten Halmahera Utara menempati urutan kedua tercepat.

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui komponen mana saja yang memiliki sumbangsih terhadap laju pertumbuhan IPM Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan Tabel 5.5. dapat terlihat laju pertumbuhan untuk semua komponen IPM bertanda positif yang berarti selama periode 2014 sampai 2016 terjadi peningkatan pembangunan manusia di Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 5.5. Laju Pertumbuhan Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016 (persen)

Komponen	Pertumbuhan		
	2014	2015	2016
1	2	3	4
Angka Harapan Hidup	0,42	0,15	0,13
Harapan Lama Sekolah	0,93	3,19	2,96
Rata-rata Lama Sekolah	0,21	0,96	3,58
Pengeluaran per Kapita	1,06	3,13	2,19
Indeks Pembangunan Manusia	0,59	1,34	1,50

Pada tahun 2014 laju pertumbuhan komponen IPM terbesar terjadi pada pengeluaran per kapita yaitu sebesar 1,06

persen. Sedangkan laju pertumbuhan paling lambat terjadi pada rata-rata lama sekolah yang tumbuh hanya sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya. Tidak begitu signifikannya pertumbuhan rata-rata lama sekolah diidentifikasi karena pada saat ini minat masyarakat Kabupaten Halmahera Utara terhadap pendidikan masih rendah.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan komponen IPM terbesar terjadi pada angka harapan lama sekolah yang meningkat sebesar 3,19 persen. Sedangkan laju pertumbuhan paling lambat terjadi pada angka harapan hidup yang hanya sebesar 0,15 persen. Perlambatan ini lebih disebabkan karena angka harapan hidup penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sudah cukup tinggi sehingga mengalami perlambatan.

Pada tahun 2016 laju pertumbuhan komponen IPM terbesar terjadi pada rata-rata lama sekolah sebesar 3,58 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, laju pertumbuhan rata-rata lama sekolah pada tahun 2016 telah tumbuh dengan sangat pesat. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang mulai memahami pentingnya pendidikan. Sedangkan laju pertumbuhan komponen IPM paling kecil terjadi pada angka harapan hidup yang hanya mencapai 0,13 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

5.3. Reduksi *Shortfall* Indeks Pembangunan Manusia

Penghitungan reduksi *shortfall* akan menghasilkan nilai yang menggambarkan perkembangan sejauh mana pembangunan telah berjalan selama periode tertentu. Dari penghitungan reduksi *shortfall* ini akan diketahui apakah pembangunan yang selama ini sudah dilaksanakan tergolong cepat, menengah, lambat atau sangat lambat. Selain itu, *shortfall* juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan tiap komponen penyusun IPM.

Reduksi *shortfall* dapat juga digunakan untuk melakukan perbandingan kecepatan pembangunan antar wilayah disuatu negara atau provinsi. Oleh karena itu perlu digunakan periode waktu yang sama sehingga dapat dilihat perbedaannya dan dibandingkan. Adanya perbandingan tersebut maka dapat menjadi bahan evaluasi wilayah mana yang telah melakukan pembangunan secara cepat dan efektif.

Berdasarkan Tabel 5.6. dapat diketahui nilai reduksi *shortfall* kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara dari tahun 2014 sampai 2016 hampir secara keseluruhan mengalami penurunan kecuali Kabupaten Taliabu yang menunjukkan kenaikan pada tahun 2015 dan kemudian menurun pada tahun 2016. Adanya kecenderungan nilai reduksi *shortfall* yang semakin menurun tiap tahunnya karena disebabkan adanya efek perlambatan akibat proses menuju keadaan ideal (IPM bernilai 100). Semakin mendekati nilai ideal atau semakin

besar nilai IPM suatu wilayah maka tantangan untuk meningkatkannya pun akan semakin berat sehingga akan memberikan kesan terjadinya perlambatan dalam pembangunan.

Tabel 5.6. Nilai Reduksi *Shortfall* Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	Reduksi <i>Shortfall</i>		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	1,577	1,532	1,481
8202	Halmahera Tengah	1,648	1,544	1,494
8203	Kepulauan Sula	1,641	1,516	1,462
8204	Halmahera Selatan	1,500	1,487	1,454
8205	Halmahera Utara	1,630	1,562	1,510
8206	Halmahera Timur	1,683	1,580	1,517
8207	Pulau Morotai*	1,582	1,572	1,496
8208	Pulau Taliabu**	1,057	1,804	1,610
8271	Kota Ternate	1,738	1,617	1,507
8272	Kota Tidore Kepulauan	1,593	1,529	1,490
8200	Maluku Utara	1,592	1,530	1,476

tahun referensi 2010

* tahun referensi 2011

**tahun referensi 2013

Keterangan:

Warna	Kecepatan Pembangunan
	Cepat
	Menengah
	Lambat
	Sangat lambat

Pembangunan yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara selama tahun 2014 sampai 2016 tergolong menengah karena memiliki nilai reduksi *shortfall* diantara 1,5 sampai 1,7. Pembangunan paling cepat terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 1,630 yang kemudian melambat untuk tahun-tahun berikutnya. Pelambatan terjadi karena nilai IPM Kabupaten Halmahera Utara yang semakin tinggi sehingga untuk menaikkan 1 poin komponen penyusun IPM menjadi lebih berat.

Berdasarkan Tabel 5.6. juga dapat diprediksi pada tahun 2017 pembangunan Kabupaten Halmahera Utara akan mengalami perlambatan kembali sehingga kecepatan pembangunan dimungkinkan akan masuk dalam kategori lambat karena nilainya akan berada pada kisaran 1,3 sampai 1,5. Adanya kemungkinan perlambatan tersebut dapat menjadi *warning* atau pengingat bagi pemerintah daerah untuk lebih menguatkan program dan kebijakan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan sehingga kecepatan pembangunan dapat dipertahankan untuk tetap masuk dalam kategori menengah atau bahkan jika mampu masuk dalam kategori cepat.

Analisis reduksi *shortfall* lebih lanjut dapat digunakan untuk mengetahui komponen penyusunan IPM mana saja yang mengalami perlambatan sehingga nantinya dapat diambil kebijakan dibidang tersebut. Tentunya ada

konsekuensi yang sama dengan reduksi *shortfall* IPM yaitu ketika nilai komponen penyusun IPM tersebut mendekati nilai idealnya, maka untuk menaikannya 1 poin akan lebih sulit.

Tabel 5.7. Nilai Reduksi *Shortfall* Komponen IPM Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2014-2016

Komponen	Reduksi <i>Shortfall</i> *		
	2014	2015	2016
1	2	3	4
Angka Harapan Hidup	1,182	1,206	1,207
Harapan Lama Sekolah	2,044	1,874	1,748
Rata-rata Lama Sekolah	1,377	1,360	1,432
Pengeluaran per Kapita	1,315	1,321	1,297
Indeks Pembangunan Manusia	1,630	1,562	1,510

*tahun referensi 2010

Keterangan:

Warna	Kecepatan Pembangunan
	Cepat
	Menengah
	Lambat
	Sangat lambat

Kecepatan pembangunan yang dilakukan melalui tiga komponen penyusun IPM Kabupaten Halmahera Utara yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan (melalui pendekatan pengeluaran) terlihat mengalami perlambatan tiap tahunnya. Hampir semua komponen penyusun IPM tersebut termasuk dalam kategori pembangunan yang tergolong lambat, hanya komponen HLS saja yang masih tergolong cepat. Namun demikian, jika dilihat trendnya maka kemungkinan besar

kecepatan pembangunan dibidang HLS akan masuk kategori menengah.

Hal yang menarik pada Tabel 5.7. terlihat AHH pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Nilai ini dapat menunjukkan bahwa program pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Utara dibidang kesehatan selama beberapa tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang cukup signifikan meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal serupa juga hampir sama untuk bidang pendidikan bagian rata-rata lama sekolah yang terlihat memiliki trend yang semakin menaik meskipun pada tahun 2015 mengalami sedikit perlambatan. Kejadian ini menunjukkan adanya perbaikan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang cukup signifikan selama tahun 2014 sampai 2016.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara perlu untuk meningkatkan terus kualitas kesehatan penduduknya karena berdasarkan Tabel 5.7. menunjukkan bahwa kecepatan pembangunan dibidang kesehatan masih tergolong sangat lambat sehingga AHH penduduk Kabupaten Halmahera Utara hanya meningkat sedikit. Program yang tepat sasaran dan terjangkaunya fasilitas kesehatan di semua wilayah Kabupaten Halmahera Utara perlu ditingkatkan. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang lebih sehingga perbaikan kualitas kehidupan penduduk Kabupaten Halmahera Utara dibidang kesehatan akan semakin cepat.

<https://halutkab.bps.go.id>

BAB VI
PENUTUP

BAB VI PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat disimpulkan:

1. IPM Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2016 sebesar 66,02 dan menempati urutan tertinggi ketiga di Provinsi Maluku Utara setelah Kota Ternater dan Kota Tidore Kepulauan.
2. Nilai reduksi *shortfall* IPM Kabupaten Halmahera Utara selama 2014 sampai 2016 selalu berada diatas 1,5 yang menunjukkan kecepatan pembangunan manusia secara simultan berjalan dengan sedang. Namun demikian, dari pengamatan nilai reduksi *shortfall* selama tiga tahun terakhir menunjukkan kecepatan pembangunan manusia secara simultan yang semakin menurun.
3. Kecepatan pembangunan manusia ditiga komponen penyusun IPM berdasarkan reduksi *shortfall* terhadap nilai IPM selama periode 2014 sampai 2016 dengan tahun referensi 2010 menunjukkan bahwa secara umum komponen penyusun IPM di Kabupaten Halmahera Utara mengalami perlambatan, kecuali AHH yang menunjukkan trend yang semakin selama tidak tahun terakhir.

6.2. Saran

Berdasarkan uraian, penjelasan dan kesimpulan yang disampaikan, terdapat beberapa saran yang penulis dapat disampaikan:

1. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara beserta dinas atau instansi terkait perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan dibidang kesehatan, pendidikan, perekonomian dan ketenagakerjaan. Kebijakan dibidang kesehatan beberapa diantaranya dapat melalui menambahkan jumlah masyarakat yang memperoleh bantuan BPJS dan mengadakan fasilitas dan saran kesehatan di daerah-daerah terpencil yang berada di kecamatan Kao Barat, Galela Utara, Loloda Utara dan Loloda Kepulauan. Dibidang pendidikan beberapa diantaranya dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan dan karier yang dapat diperoleh serta memberikan akses pendidikan kepada semua penduduk Kabupaten Halmahera Utara dengan mengadakan sekolahan di daerah yang jauh dari pusat keramaian. Dibidang ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan kepada para pemuda untuk bisa mengembangkan pertanian Kabupaten Halmahera Utara. Dibidang perekonomian dapat melalui penjagaan harga pasar supaya tetap terkendali, memberikan bantuan modal dan pelatihan

kompetensi untuk pengusaha-pengusaha potensial, dan mengadakan forum komunikasi yang baik antara pengusaha, pekerja dan pemerintah sehingga terjadi keterbukaan dan pencarian solusi bersama-sama.

2. Perlu adanya komunikasi yang baik antara lembaga pemerintahan baik yang berada dalam lingkungan pemerintahan daerah maupun yang tidak sehingga akan lebih sinergis, melengkapi dan menguatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia 2016*. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. (2017). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Maluku Utara 2016*. Ternate: BPS.

undp.org

<https://halutkab.bps.go.id>

Sengaja Dikosongkan

<https://halutkabpps.go.id>

LAMPIRAN

<https://halutkab.lms.go.id>

Lampiran 1

Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	AHH (tahun)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	65,15	65,35	65,45
8202	Halmahera Tengah	62,20	62,40	62,60
8203	Kepulauan Sula	62,29	62,39	62,50
8204	Halmahera Selatan	64,93	65,03	65,11
8205	Halmahera Utara	68,67	68,77	68,86
8206	Halmahera Timur	67,19	67,49	67,67
8207	Pulau Morotai	65,78	65,98	66,13
8208	Pulau Taliabu	60,98	61,08	61,20
8271	Kota Ternate	69,97	70,07	70,17
8272	Kota Tidore Kepulauan	68,33	68,43	68,54
8200	Maluku Utara	67,34	67,44	67,51

Lampiran 2

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota mdi Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	HLS (tahun)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	12,15	12,61	13,05
8202	Halmahera Tengah	12,27	12,29	12,70
8203	Kepulauan Sula	11,69	11,83	12,23
8204	Halmahera Selatan	11,32	11,91	12,31
8205	Halmahera Utara	12,29	12,69	13,06
8206	Halmahera Timur	12,06	12,09	12,48
8207	Pulau Morotai	10,92	11,59	11,92
8208	Pulau Taliabu	10,96	11,48	11,73
8271	Kota Ternate	14,66	15,05	15,06
8272	Kota Tidore Kepulauan	13,09	13,27	13,74
8200	Maluku Utara	12,72	13,10	13,45

Lampiran 3

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	RLS (tahun)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	7,71	7,77	7,86
8202	Halmahera Tengah	7,74	7,85	8,14
8203	Kepulauan Sula	7,91	7,95	7,96
8204	Halmahera Selatan	7,03	7,15	7,42
8205	Halmahera Utara	7,98	8,06	8,35
8206	Halmahera Timur	7,34	7,57	7,77
8207	Pulau Morotai	6,84	6,84	6,88
8208	Pulau Taliabu	7,40	7,41	7,42
8271	Kota Ternate	11,11	11,12	11,13
8272	Kota Tidore Kepulauan	8,72	8,91	9,11
8200	Maluku Utara	8,34	8,37	8,52

Lampiran 4

Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	Pengeluaran (ribu rupiah)		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	6.697	6.889	7.076
8202	Halmahera Tengah	7.130	7.359	7.481
8203	Kepulauan Sula	6.491	6.545	6.741
8204	Halmahera Selatan	6.704	6.791	6.894
8205	Halmahera Utara	6.746	6.957	7.110
8206	Halmahera Timur	7.212	7.410	7.560
8207	Pulau Morotai	5.720	5.809	5.888
8208	Pulau Taliabu	5.935	6.158	6.208
8271	Kota Ternate	12.454	12.529	12.643
8272	Kota Tidore Kepulauan	7.454	7.631	7.772
8200	Maluku Utara	7.234	7.423	7.545

Lampiran 5

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2016

Kode	Prov/Kab/Kota	IPM		
		2014	2015	2016
1	2	3	4	5
8201	Halmahera Barat	62,06	62,97	63,83
8202	Halmahera Tengah	61,49	62,07	63,05
8203	Kepulauan Sula	60,18	60,50	61,25
8204	Halmahera Selatan	60,34	61,26	62,17
8205	Halmahera Utara	64,18	65,04	66,02
8206	Halmahera Timur	63,26	63,99	64,92
8207	Pulau Morotai	58,34	59,27	59,87
8208	Pulau Taliabu	57,31	58,26	58,66
8271	Kota Ternate	77,15	77,64	77,80
8272	Kota Tidore Kepulauan	66,76	67,45	68,37
8200	Maluku Utara	65,18	65,91	66,63

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



*Badan Pusat Statistik
Kabupaten Halmahera Utara
Jl. Kawasan Pemerintahan, Tobelo ; email : bps8205@gmail.com*